

SKRIPSI

PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

(Studi Kasus Di Dinas Sosial Kabupaten Bima)

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Publik (S.AP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh :

KHAIRUNNISA
NIM. 218110101

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH MATARAM
MATARAM
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENAGGULANGAN
KEMISKINAN

(Studi Kasus Di Dinas Sosial Kabupaten Bima)

Oleh :

KHAIRUNNISA
NIM :218110101

Telah memenuhi syarat dan disetujui

Menyetujui Untuk di Uji

Pembimbing I



Drs. H. Abdurrahman, M.M.
NIDN. 0804116101

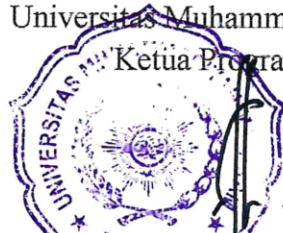
Pembimbing II



✓ **Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP.**
NIDN. 0822048901

Menyetujui,

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Ketua Program Studi,



✓ **Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP.**
NIDN. 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENAGGULANGAN KEMISKINAN

(Studi Kasus Di Dinas Sosial Kabupaten Bima)

Oleh :

KHAIRUNNISA

NIM. 218110101

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 6 Januari 2023
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. Drs. H. Abdurrahman, M.M.

NIDN. 0804116101

(PU)  (.....)

2. Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP.

NIDN. 0822048901

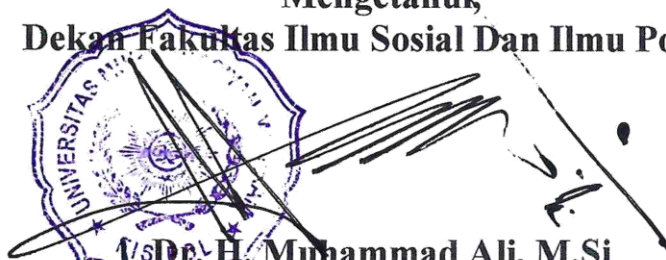
(PP)  (.....)

3. Dr. Rossi Maunofa Widayat, S.IP., M.A.

NIDN. 0825118501

(PN)  (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Saya Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa :

Nama : Khairunnisa

Nim : 218110101

Memang benar Skripsi yang berjudul Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Bima adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di Universitas Muhammadiyah Mataram. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan bimbingan dan terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan kedalam daftar pustaka.

Jika kemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar saya siap mempertanggung jawabkan, termasuk bersedia meninggalkan gelar sarjana yang akan saya peroleh :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 6 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Khairunnisa
218110101



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fhairunnisa
 NIM : 218110101
 Tempat/Tgl Lahir : Ranta, 14-09-2000
 Program Studi : Administrasi Publik
 Fakultas : Fisipol
 No. Hp : 085239114158
 Email : fhairunnisa14092000@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(STUDI KASUS DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BIMA)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 90%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, RABU 01 Februari 2023
 Penulis



Fhairunnisa
 NIM. 218110101

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairunnisa
 NIM : 218110101
 Tempat/Tgl Lahir : Ratu, 14-09-2000
 Program Studi : Administrasi Publik
 Fakultas : Fisipol
 No. Hp/Email : 085239114158
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(STUDI KASUS DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BIMA)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, Ratu 01 Februari 2023

Penulis



Khairunnisa
 NIM. 218110101

Mengetahui,
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

“Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam“



PERSEMBAHAN

Rasa syukur atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah diberikan oleh Allah SWT, serta dengan penuh rasa kasih sayang dan cinta ku persembahkan kepada.

1. Kedua orang tuaku tersayang bapak (Abdul Haris) dan ibu (Dahlia) yang selama ini selalu menyayangi dan mendo'akanku disetiap langkahku, skripsi ini adalah sebagai tanda cinta dan baktiku kepada kalian yang selama ini sudah banyak berkorban demi tercapainya cita-citaku.
2. Terimakasih juga kepada bapak Drs. H. Abdurrahman, M.M dan bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP. yang sudah banyak membantu dalam penyusunan skripsi.
3. Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di jurusan ilmu administrasi publik semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT
4. Kekasih tercinta syahril terima kasih atas dukungan dan waktunya untuk mendampingi saya selama ini dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikumwarahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang berjudul “PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (studi kasus di dinas sosial kabupaten bima)”

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sedikit menemukan kendala, namun atas bantuan dari berbagai pihak sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini pula dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani,. M.Pd selaku rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP selaku Ketua Prodi Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs. H. Abdurrahman, M.M. selaku dosen pembimbing utama dan sebagai pembimbing Skripsi yang sabar memberikan bimbingan kepada

penulis dan telah banyak memberikan bantuan, arahan, masukan, kritik dan saran yang berarti dalam menyusun Skripsi ini.

5. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP. selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan masukan, kritik dan saran yang berarti dalam menyusun Skripsi ini.
6. Kepada Ayah dan Ibuku Tercinta yang selama ini selalu memberikan motivasi, mendukung dan mendo'akan penulis. Inilah bukti cinta dan kasih sayang yang engkau berikan dan kerja keras yang engkau lakukan untuk anakmu.
7. Abang dan adikku (Sahril, Sukardin) dan semua keluarga besarku terimakasih atas dukungan dan motivasinya selama ini
8. Terimakasih sahabat-sahabat ku yang telah memberikan semangat untuk ku (Mira Asmara, SusantiUnut, Florentina Melinda Samul, Desi Rahmawati, Mulia Ningsih, Risnawati, Antariani).

Harapan penulis semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Akhir kata semoga Skripsi ini bermanfaat bagi yang membutuhkan Amin,

Wassalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Mataram, 28 Juli 2022

Penulis,

KHAIRUNNISA
218110101

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(Studi Kasus Di Dinas Sosial Kabupaten Bima)**

**Drs. H. Abdurrahman¹, Rahmad Hidayat² Khairunnisa³
Pembimbing Utama¹, Pembimbing², Mahasiswa³
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram**

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang ada di dinas sosial kabupaten bima yang menjadi sasaran program dinas sosial. Program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan, namun demikian belum ada data yang dapat menjelaskan sejauh mana efektivitas program tersebut. Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka penelitian dilaksanakan dengan tujuan mengetahui peran dinas sosial dalam penanggulangan kemiskinan di dinas sosial kabupaten bima. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yakni dengan cara melakukan wawancara dan melakukan studi dokumentasi terhadap hasil penelitian yang erat kaitannya dengan objek yang diteliti dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan dinas sosial kabupaten bima telah melaksanakan perannya dalam penanggulangan kemiskinan di kabupaten bima, hal ini dapat dilihat dari menurunnya angka kemiskinan di dinas sosial kabupaten bima setiap tahunnya. Berdasarkan program yang mereka lakukan yaitu ada empat macam peran : Peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasional dan peran teknis. Adapun kendala yang dihadapi oleh dinas sosial kabupaten bima dalam penanggulangan kemiskinan yakni kurangnya anggaran dari pemerintah, kurangnya sumber daya manusia dan tingginya angka kemiskinan.

Kata Kunci : Dinas sosial dalam penanggulangan kemiskinan

THE ROLE OF SOCIAL SERVICES IN POVERTY REDUCTION
(Case Study at the Bima District Social Service)

Drs. H. Abdurrahman¹, Rahmad Hidayat² Khairunnisa³
First Consultant¹, Second Consultant², Student³

Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

One of the social issues that the social service program is intended to address in the Bima district is poverty. There are now programs in place to reduce poverty. The degree of the program's effectiveness, however, cannot be determined by data. The research was conducted to learn about the social services in the Bima district's involvement in reducing poverty about the research problem. A descriptive methodology with a qualitative approach is applied by utilizing both primary and secondary data sources. The tactics used to acquire data include conducting interviews and documenting studies on research findings directly related to the subject being studied and observed. The findings of this study show that the Bima district social service has fulfilled its responsibility for reducing poverty in the Bima area. It is evident by the annual drop in the poverty rate at the social service centre for the Bima district. There are four roles: facilitative, educational, representative, and technical, depending on the program they execute. The absence of a budget from the government, a shortage of human resources, and high poverty rates are challenges faced by the Bima district social service in reducing poverty.

Keywords: Social service in poverty alleviation

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

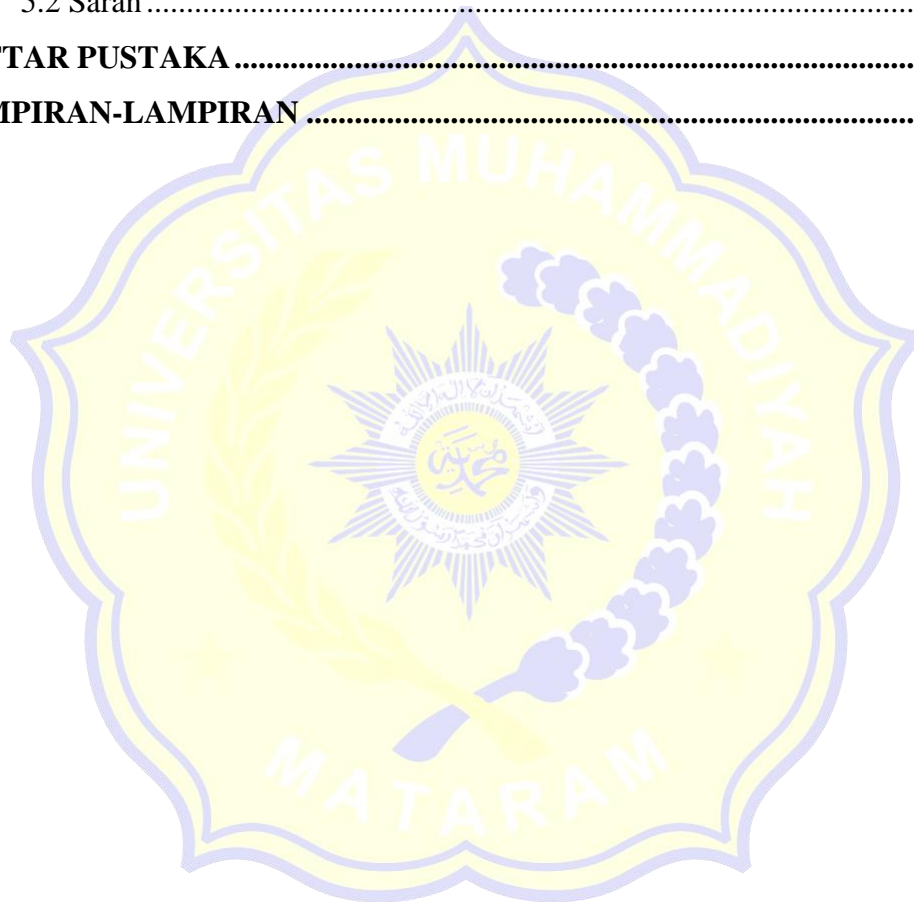


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penulisan	11
1.4 Manfaat Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	13
2.2 Peranan	17
2.2.1 Pengertian Peranan	17
2.2.2 Peranan Dinas Sosial	24
2.3 Dinas Sosial	25
2.3.1 Pengertian Dinas Sosial	25
2.3.2 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	25

2.6 Evaluasi Program.....	26
2.6.1 Pengertian Evaluasi Program	26
2.6.2 Tujuan Evaluasi Program.....	28
2.6.3 Manfaat Evaluasi Program.....	29
2.7 Indikator Kondisi Keberhasilan.....	30
2.8 Teori Kemiskinan	31
2.8.1 Definisi Kemiskinan	31
2.8.2 Pengertian Kemiskinan Menurut Para Ahli	32
2.8.3 Kemiskinan Tersebar Dimana Saja.....	33
2.8.4 Jenis-Jenis Kemiskinan.....	34
2.8.5 Faktor Penyebab Kemiskinan	35
2.8.6 Dampak Dari kemiskinan	38
2.8.7 Ciri-Ciri Kemiskinan	39
2.8.8 Permasalahan Kemiskinan.....	40
2.9 Kerangka berfikir.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	43
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	44
3.3 Sumber Data	44
3.4 Teknik Penentuan Informan	45
3.5 Metode Pengumpulan Data	47
3.6 Teknik Analisis Data	48
3.7 Keabsahan Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1 Gambaran Umum Daerah penelitian	53
4.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah	53
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Bima.....	55
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bima	56
4.1.4 Kependudukan dan Ketenagakerjaan.....	67
4.2 Hasil Penelitian.....	72

4.2.1 Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Dinas Sosial Kabupaten Bima	72
4.2.2 Data Keuangan Anggaran Kabupaten Bima	74
4.2.3 Kendala Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Dinas Sosial Kabupaten Bima	98
BAB V PENUTUP	101
5.1 Kesimpulan	101
5.2 Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	106



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Data Penduduk Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bima.....	5
Tabel 4.1.	Jumlah Kecamatan, Desa, Dusun Tiap Kecamatan / Kabupaten Tahun 2019.....	54
Tabel 4.2.	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur	67
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Lapangan Usaha.....	68
Tabel 4.4.	Tingkat Pendidikan Dinas Sosial Kabupaten Bima	69
Tabel 4.5.	Kelompok Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan	70
Tabel 4.6.	Jumlah Penduduk dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bima Dari Tahun 2012-2021	72
Tabel 4.7	Kontribusi PAD Terhadap APBD Tahun 2014-2018	74
Tabel 4.8	Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Bima.....	74
Tabel 4.9	Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Bima.....	75
Tabel 4.10	Total Penerimaan Daerah Kabupaten Bima	75
Taembl 4.11	Total Belanja Daerah Kabupaten Bima.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	42
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kab. Bima	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian	107
Lampiran 2. Lembar Konsultasi Skripsi	108
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian	111



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dapat dilihat di daerah kabupaten bima kemiskinan merupakan suatu keadaan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang yang kebutuhannya tidak dapat dipenuhi seperti kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan, serta sandang, seperti perumahan, dan pangan. Kurangnya akses pendidikan dan pekerjaan, serta kurangnya sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar, menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah global dan banyak orang menafsirkan istilah ini secara subyektif dan komparatif, yang menafsirkannya dari perspektif moral dan evaluative yang lain menafsirkannya dari perspektif ilmiah yang mapan, dan seterusnya. Ada banyak cara yang berbeda untuk mendefinisikan kemiskinan. Karna menyakut masalah utama dalam hidup masyarakat:

Badan pusat statistik (2010), mendefinisikan bahwa penduduk miskin dengan rata-rata pengeluaran per bulan yang mempunyai pendapatan di bawah Rp. 7.057 per hari dari setiap masing-masing orang, dari hasil perhitungan angka Rp. 7.057 yang berasal dari garis kemiskinan, memperhitungkan kebutuhan makanan yang dibutuhkan atau setara dengan 2.100 kilogram kalori per hari. Kemiskin merupakan suatu keterpurukan dengan mempertahankan hak-hak dasar untuk hidup bermartabat.

Gambaran kekurangan bahan, yang mencakup seperti perumahan, layanan kesehatan, dan kebutuhan makanan sehari-hari, dan pakaian. Pengertian kemiskinan dalam hal ini, didefinisikan sebagai kekurangan barang dan jasa penting.

Gambaran tentang kebutuhan sosial, seperti terisolasi secara sosial, menjadi tergantung, dan tidak dapat menjadi bagian dari masyarakat. Informasi dan pendidikan termasuk di dalamnya sudah seringkali, terisolasi dengan kemiskinan karena mencakup masalah politik dan moral selain masalah ekonomi.

Kemiskinan merupakan masalah yang mendasar yang dihadapi oleh masyarakat. Sebab, di satu sisi menentukan tingkat perkembangan pada suatu masyarakat, dan di sisi lain menjadi pertanda gagalnya proses pembangunan karena kemiskinan juga merupakan tanda pertumbuhan ekonomi pasar yang tidak seimbang dan penurunan efektivitas berbagai institusi sosial dalam menyelesaikan masalah kependudukan. Orang-orang dan bangsa-bangsa di seluruh dunia kadang-kadang terus menghadapi masalah kemiskinan.

Kemiskinan ini terjadi akibat adanya perbedaan kemampuan pada masyarakat dari pelaku ekonomi, yang menghalangi sebagian individu untuk ikut serta dalam proses pembangunan atau mengambil manfaat dari hasilnya (Soegijoko, 1997:137).

Kemiskinan adalah masalah pembangunan yang ditandai dengan adanya pengangguran, seperti stagnasi, dan keterbelakangan masyarakat miskin, karna

tidak memiliki akses terhadap kegiatan sosial ekonomi karna tidak mampu melakukan usaha (UU No. 25 Tahun 2000 tentang Propenas).

Karena kemiskinan merupakan masalah yang sangat rumit, maka untuk mengatasinya diperlukan pendekatan yang komprehensif yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan seseorang dan terintegrasi.

Menurut Remi dan Tjiptoherijanto (2002:1) mengatakan bahwa program Bimbingan Masyarakat (Bima) dan Bantuan Desa (Bandes) merupakan salah satu upaya pertama untuk menurunkan angka kemiskinan pada awal tahun 1970-an. Namun upaya tersebut mencapai titik jenuh pada pertengahan tahun 1980-an, yang juga berarti bahwa upaya pengentasan kemiskinan pada tahun 1970-an tidak berhasil, sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat miskin pada awal tahun 1990-an. Selain itu, tren peningkatan ketimpangan pendapatan mencakup ketimpangan antarsektor, kelompok, dan wilayah.

Pada akhir tahun 1998, krisis ekonomi yang sedang berlangsung telah meningkatkan jumlah penduduk miskin menjadi 49,5 juta jiwa atau 24,2% dari total penduduk Indonesia. Yang perlu dicatat bahwa perubahan dalam standar yang digunakan, serta krisis ekonomi, berkontribusi pada peningkatan jumlah orang miskin (BPS, 2003:575). Karna banyaknya jumlah masyarakat yang hidup di atas garis kemiskinan menjadi penyebab utama pertumbuhan populasi. Ketika terjadi krisis, kenaikan harga tanpa diimbangi dengan kenaikan pendapatan nominal menyebabkan garis kemiskinan naik, membuat mereka yang tadinya tidak dianggap miskin menjadi miskin (UU No. 25 Tahun 2000, tentang Propenas).

Sejumlah faktor berkontribusi terhadap kemiskinan, seperti kurangnya pendidikan, sikap malas bekerja, kelangkaan sumber daya alam, kurangnya kesempatan kerja, dan kurangnya modal. Menurut Badan Pusat Statistik, 9,41% penduduk miskin pada Maret 2019. terdapat 25,14 juta penduduk miskin yang hidup di Indonesia. Angka kemiskinan Indonesia meningkat pada tahun 2020. Hal ini berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menemukan bahwa terdapat 27,55 juta penduduk miskin di Indonesia. Ini merupakan peningkatan sebesar 2,76 juta dibandingkan tahun sebelumnya, yang juga merupakan pampak dari Covid. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah sosial yang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

1. Penyebab Kemiskinan

Masalah kemiskinan memang sudah ada sejak awal masa lalu, kebanyakan orang menjadi miskin bukan karena tidak memiliki cukup makanan, tetapi karena tidak memiliki sumber daya atau fasilitas yang cukup karena, Mereka tidak memanfaatkan fasilitas pendidikan, dan layanan medis, dan kenyamanan moderen lainnya yang tersedia bagi mereka dari standar hidup saat ini. Selain masalah lain seperti pendapatan, struktur pemerintahan, inflasi, defisit anggaran, dan lain-lain, pemerintah Indonesia yang fokus untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dan mapan secara ekonomi, sangat yakin bahwa kemiskinan adalah masalah mutlak yang harus diatasi langsung oleh pemerintah.

Tabel 1.1. Data Penduduk Miskin Di dinas Sosial Kabupaten Bima

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin/keluarga	Jumlah Penduduk Miskin/Jiwa
1.	2019	84.225 Keluarga	375.291 Orang
2.	2020	80.333 Keluarga	370.839 Orang
3.	2021	80.326 Keluarga	370.687 Orang

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin selalu menurun selama tiga tahun terakhir, terbukti dengan jumlah penduduk miskin mulai pada tahun 2019, yaitu 84.225 KK dengan 375.291 jiwa, dan menurun menjadi 80.333 KK dengan 370.893 jiwa pada tahun 2020. Pemerintah berkenan , dan pada tahun 2021, jumlah keluarga akan kembali turun menjadi 80.326 jiwa dengan 370.687 jiwa, meskipun laju penurunannya lambat. Berdasarkan data pada Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin di dinas sosial kabupaten bima mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 dan tahun 2021 ke tahun 2020 dan tahun 2021.

2. Dampak Kemiskinan

Dampak kemiskinan memiliki efek yang berbeda mulai dari demonstrasi kriminal, pengangguran, kesejahteraan yang terganggu, dan banyak lagi. Kemelaratan memang bisa menjadi penyebab berbagai masalah, namun sampai pemberitahuan lebih lanjut masalah utamanya adalah bagaimana anak-anak kecil yang sama sekali tidak layak untuk pergi

ke kelas dan juga anak-anak lainnya. Pertama-tama, itu adalah masalah yang harus ditangani oleh otoritas publik karena jika masalah itu tidak dapat diselesaikan, maka pada saat itu akan ada lebih banyak masalah baru. Dan juga banyak orang miskin yang jatuh sakit tetapi sulit bagi mereka untuk pergi ke dokter karena biayanya mahal, meskipun pemerintah telah memberikan kartu kebutuhan tetapi itu tidak menjamin berada di klinik darurat.

3. Cara Penanggulangan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya bersama semua pihak yang terlibat, membutuhkan kerjasama dan sinergi dari semua pihak. Dengan menitikberatkan pada upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah termasuk pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat, akademisi dan perguruan tinggi, kalangan politik, dan tentunya masyarakat itu sendiri, harus mengembangkan kesamaan visi, pola pikir, yang saling menguatkan tindakan. Berbagai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat dicapai secara efektif dalam kemitraan yang saling menguntungkan ini. Pemerintah sangat mendukung setiap ide dan inisiatif baru yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh semua pihak untuk mendukung upaya peningkatan taraf hidup masyarakat.

Kemiskinan pada dasarnya adalah masalah yang telah bertahan sepanjang sejarah manusia. Belum ada metode yang sempurna untuk mengatasi kemiskinan yang ditemukan sampai saat ini. Tidak ada definisi

universal tentang kemiskinan. Strategi penanggulangan kemiskinan masih perlu dikembangkan. Konsep kemiskinan adalah subjek dari banyak teori.

Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial di Indonesia yang harus selalu dikaji secara mendalam. Hal ini tidak hanya karena kemiskinan telah menjadi masalah sejak lama dan masih menjadi masalah masyarakat saat ini, juga gejalanya yang semakin parah dengan krisis multifaset yang masih dihadapi Indonesia. 4. Undang-Undang No.11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dalam masalah pidana, memiliki hubungan yang erat dengan Hukum Ekonomi. Tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan sosial dan kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar masyarakat. Sebaliknya, dalam hukum ekonomi, apa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdapat korelasi antara kondisi sosial ekonomi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan negara melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memikul beban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan sosial. keadilan. Dalam upaya mencapai tujuan bangsa, sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial adalah bagi seluruh rakyat Indonesia .pemerintah mengeluarkan UU No.11 tahun

2009 dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat sehari-hari dan mewujudkan kehidupan yang layak. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan.

Kesejahteraan sosial adalah kebutuhan warga negara untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar mereka dapat hidup nyaman, tumbuh, dan melakukan tugas sosialnya. Cakupan kegiatan ekonomi mencakup hal-hal seperti mencari tahu bagaimana memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesejahteraan materi. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia belum mencapai tingkat kesejahteraan sosial yang diinginkan, maka tingkat kesejahteraan sosial tersebut perlu terus diupayakan. Kemampuan menangani masyarakat yang bermasalah dengan kesejahteraan sosial sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Jika tidak mungkin untuk secara efektif melayani kelompok yang kurang beruntung secara sosial, kemajuan ekonomi tidak akan berarti. Akibatnya, pembangunan kesejahteraan sosial terus berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi.

UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial mencakup pula Hukum publik juga termasuk dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial tahun 2009. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia. Hukum perdata dan hukum dagang mempelajari hukum privat. Hubungan antara negara dan warganya diatur oleh hukum publik.

Hukum Kesejahteraan Sosial lebih komprehensif daripada hukum perdata dan komersial. Ini juga mencakup undang-undang lain selain hukum perdata dalam pasal-pasalannya. Undang-Undang Kesejahteraan

Sosial termasuk dalam hukum ekonomi sesuai dengan karakteristiknya sehingga tidak dapat digolongkan sebagai hukum tunggal.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial mencakup berbagai disiplin hukum. Hukum pidana yang berkaitan dengan upaya perlindungan sosial dilakukan dengan bantuan bantuan sosial, advokasi, dan perwakilan hukum. Pemberian jaminan sosial berupa asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung, dan tunjangan dalam hukum dagang.

Pada hakekatnya, tidak ada Undang-Undang 11 Tahun 2009 yang mengatur kesejahteraan sosial lebih mendalam dari pada hukum ekonomi. Berdasarkan kesamaan kegiatan dan tujuan, yang meliputi pemenuhan kebutuhan, kehidupan sehari-hari, dan berbagai aspek kesejahteraan material seseorang. Dengan demikian, Hukum tidak berlaku. Pepatah mengatakan, “Lex specialis derogat lex generalis,” demikian Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 merinci pengaturan kesejahteraan sosial dari hukum ekonomi. Hukum ekonomi lebih diutamakan daripada Undang-Undang Kesejahteraan Sosial tahun 2009

Prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Jaminan Sosial:

a. Asas Iman dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Asas ini dalam hukum ekonomi Di Indonesia, yang paling mendasar untuk mengembangkan hukum yang mengatur kegiatan dianggap sebagai hukum ekonomi. Menurut sila pertama Pancasila,

Indonesia adalah bangsa yang didirikan atas kebutuhan Yang Maha Kuasa. Karena kepedulian terhadap sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, maka Hukum Kesejahteraan Sosial juga didasarkan pada Prinsip Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Asas Kepastian Hukum

Indonesia adalah. Negara hukum, dengan cara ini ada sebuah asas yaitu Asas kepastian Hukum.

c. Asas Keterbukaan

Asas memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah transparansi. Dengan informasi yang akurat, penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus seragam.

d. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas menyatakan bahwa setiap program kesejahteraan sosial harus didokumentasikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Masyarakat harus bertanggung jawab atas setiap kegiatan ekonomi yang melayani kepentingan masyarakat dan hasilnya.

e. Asas Kemandirian

Berdasarkan aturan dalam kepercayaan adalah normal oleh individu yang memiliki harapan rendah untuk kehidupan sehari-hari untuk mempercepat pelaksanaan dan pemenuhan kebutuhan moneter.

f. Asas Pembangunan Berkelanjutan

Asas untuk mencapai swasembada, prinsip keberlanjutan memerlukan pemberian bantuan sosial yang berkelanjutan.

g. Asas Manfaat

Asas penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup warga negara, sesuai dengan asas kemanfaatan.

h. Asas keadilan dan Pemerataan

Asas keadilan adalah Pemerataan, nondiskriminasi, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban harus ditekankan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran dinas sosial dalam penanggulangan kemiskinan di dinas sosial kabupaten bima?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh dinas sosial dalam penanggulangan kemiskinan di dinas sosial kabupaten bima ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana peran dan upaya yang dilakukan oleh dinas sosial dalam penanggulangan kemiskinan di dinas sosial kabupaten bima
2. Untuk mengetahui kendala- kendala yang dihadapi oleh dinas sosial dalam penanggulangan kemiskinan pada dinas sosial kabupaten bima

1.4 Manfaat Penulisan

1. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu yang dimiliki oleh penulis untuk menambah pengetahuan penulis dalam menganalisa peran dinas sosial dalam penanggulangan kemiskinan.
2. Untuk menyumbang pemikiran bagi instansi yang terkait dalam usaha penanggulangan kemiskinan.
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki persoalan yang sama.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis membutuhkan sumber bacaan dari penelitian yang terdahulu yang dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan perbandingan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti. Untuk memberikan gambaran tentang tujuan dari penelitian yang akan dipaparkan dalam hal tersebut kami sangat membutuhkan sumber bacaan di atas karena karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya dari buku-buku yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat oleh penulis.

No	Unsur Penelitian	Uraian
1.	Peneliti	Rima Fitriani (2013)
	Judul	Strategi Pengentasan Kemiskinan Menggunakan Kartu Menuju Sejahtera di Dinas Tenaga Kerja dan Migrasi Kota Yogyakarta
	Variabel Penelitian	<p>a. peneliti Variabel mandiri (Independent Variables) Strategi pelayanan sosial tenaga kerja dan migrasi dapat diukur mulai dari</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan terhadap keluarga miskin dan pelaksanaan program Kartu Menuju Sejahtera (KMS) 2. Strategi Mengakhiri Kemiskinan Melalui Program Kartu Menuju Kesejahteraan <p>b. Variabel tergantung pada penggunaan kartu Menuju Sejahtera untuk mengurangi kemiskinan.</p>
	Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif
	Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada proses pendekatan ini meninjau hasil dari konfirmasi data dari RT/RW kelurahan atau kabupaten dengan pekerja sosial masyarakat (PSM), keluarga miskin di Kota Yogyakarta akan menerima KMS. Setelah hasil, pendataan tersebut diserahkan ke dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menentukan tahap akhir penerima KMS.

		<p>dilanjutkan dengan verifikasi data yang terkonfirmasi melalui home visit atau konfirmasi tatap muka dengan ketua RT.</p> <p>2. Strategi penanggulangan kemiskinan Dinas Sosial Kota Yogyakarta melalui kebijakan KMS yaitu memberikan akses pada masyarakat miskin terhadap pelayanan pendidikan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu guna penuntasan belajar wajib 12 tahun. Tujuan diberikannya jaminan pendidikan daerah adalah agar tidak ada anak usia yang putus sekolah dari pemegang KMS yang tidak bersekolah karena alasan biaya sehingga akses pendidikan dapat terjangkau di semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.</p>
	Persamaan dan Perbedaan	<p>Penelitian yang dilaksanakan oleh Rima Fitriani pada tahun (2013) dengan metode peneliti yang sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam hal ini memiliki Perbedaan yang dilakukan oleh Rima Fitriani (2013) Mengkaji Tentang Kebijakan pemerintah melalui Program KMS (Kartu Menuju Sejahtera) Sebagai suatu wadah untuk pengentasan kemiskinan pada hal penulis melihat dari Kebijakan, Regulasi, dari Strategi yang diambil oleh Dinas Sosial.</p>
2	Peneliti	Hikmawati (2016)
	Judul	Peran bakti Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Provinsi Lampung.
	Variabel Penelitian	<p>a. Variabel bebas (Independent Variables) Peran pelayanan sosial dapat diukur dari;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran dinas sosial dalam pengentasan kemiskinan melalui pendekatan KUBE (Kelompok Usaha Bersama). 2 Pendekatan kelompok usaha bersama (KUBE) sebagai salah satu teknik pengentasan kemiskinan. <p>b. Variabel tergantung pada pengentasan kemiskinan</p>
	Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif
	Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial terhadap fakir miskin Perkotaan di Provinsi Lampung adalah sebagai representasi atas dekosentrasi dan tugas pembantuan dari Pemerintah pusat

		<p>(Kementrian Sosial RI) kepada pemerintah daerah (Dinas Sosial) dengan fungsi perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan bantuan sosial di Provinsi Lampung dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).</p> <p>2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan penyaluran bantuan terhadap fakir miskin di Provinsi Lampung ada 2 di antaranya ;</p> <p>a. Minimnya pengetahuan kelompok KUBE di Provinsi Lampung dalam membuat rekening untuk kepentingan bersama yang menghabiskan waktu cukup lama;</p> <p>b. Bahasa, terkadang saat sosialisasi dan evaluasi seksi pemberdayaan fakir miskin dinas sosial Provinsi Lampung mengalami kesulitan interaksi dengan anggota KUBE karena mereka terkadang masih sering menggunakan bahasa suku atau bahasa daerah masing-masing.</p>
	Persamaan dan Perbedaan	<p>Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Hikmawati juga pada tahun (2016) dengan penelitian yang sama dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.</p> <p>Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hikmawati pada tahun (2016) juga mengkaji tentang hak perlindungan sosial dengan berbasis individu, dalam penanggulangan kemiskinan dengan berbasis pemberdayaan ekonomi mikro kecil. Padahal penulis melihat dari kebijakan, regulasi dari strategi yang diambil oleh Dinas Sosial.</p>
3	Peneliti	Didin Ismoyo (2017)
	Judul	Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan
	Variabel Penelitian	<p>a. Variabel bebas (Independent Variables) Peran Pemerintah dapat di ukur dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Tingkat Kemiskinan <p>b. Variabel tergantung penanggulangan kemiskinan</p>
	Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif
	Hasil	1. Peran Pemerintah Desa Cangkol dalam

		<p>penanggulangan kemiskinan. Pertama pembangunan pertanian, kedua pembangunan masyarakat terpadu, ketiga perbaikan pangan, keempat idustrialisasi desa, kelima pembangunan masyarakat dan keterampilan masyarakat, keenam peningkatan kesehatan masyarakat.</p> <p>2. Faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat kemiskinan di desa Cangkol. Pertama faktor pengangguran, kedua faktor ketidak tepatan pendapatan, ketiga faktor sosial lingkungan, keempat faktor rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kelima, faktor rasio ketergantungan penduduk, keenam pemanfaatan sumber daya pertanian belum optimal, ketujuh faktor kesehatan.</p>
	Persamaan dan Perbedaan	<p>Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Didin Ismoyo (2017) dengan peneliti sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.</p> <p>Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Didin Ismoyo (2017) menganalisa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat kemiskinan di desa Cangkol, ingin mengetahui peran pemerintah desa dalam penanggulang kemiskinan. Sedangkan Penulis Mengkaji Tentang Kebijakan, Regulasi, dan Strategi yang diambil oleh Dinas Sosial.</p>
4.	Peneliti	Supriadi (2017)
	Judul	Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Khilan Di Kota Palopo
	Variabel Penelitian	<p>a. Variabel bebas (Independent Variables) Peran Pemerintah daerah dapat diukur dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Khilan 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Khilan di Kota Palopo. <p>b. Variabel tergantung Penanggulangan Kemiskinan</p>
	Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif
	Hasil	1. Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui program Khilan dapat dikategorisasi secara umum menjadi dua peran yaitu penumbuhan iklim usaha dan

		<p>penguatan potensi atau daya usaha. Penumbuhan iklim usaha meliputi pendanaan, bantuan sarana & prasarana kepada pelaku Khilan, penyebarluasan informasi usaha, serta bantuan promosi dagang. Penguatan potensi atau daya berupa pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi. Semua upaya tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Kota Palopo meskipun belum sepenuhnya maksimal.</p> <p>2. Faktor yang mempengaruhi pemberdayaan Khilan di Kota palopo meliputi faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat kurangnya inovasi dalam pemasaran dan terbatasnya anggaran yang hanya sekian persen, Sedangkan faktor pendukung sumberda daya manusia dan sumber daya alam.</p>
	<p>Persamaan dan pemberdayaan</p>	<p>Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Supriadi (2017) dengan peneliti sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.</p> <p>Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Supriadi (2017) Mengkaji tentang peran pemerintah daerah dalam menumbuhkan iklim usaha dalam menguatkan potensi atau daya usaha, faktor yang mempengaruhi pemberdayaan khilan di kota palopo Sedangkan Penulis mengkaji tentang Kebijakan, Regulasi, dan Strategi di Dinas Sosial.</p>

2.2 Peranan

2.2.1 Pengertian Peranan

Peranan adalah merupakan aspek dari posisi yang bersifat dinamis dari. Seseorang yang telah memenuhi peran ketika dia bertindak sesuai dengan posisinya dan memenuhi hak dan tanggung jawabnya. Posisi dan peran saling berkaitan. Tidak ada posisi tanpa peran, dan tidak ada peran tanpa posisi.

Soerjono S, (1990:26), yang menyatakan bahwa “peran meliputi norma-norma yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian aturan yang menuntun seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut pendapat Miftah Thoha, 2005, Salbin T.R. dan Allen V.E Soerjono Soekanto (2000: “Peran diartikan sebagai rangkaian tingkah laku yang timbul karena kedudukan tertentu, karena kedudukan mudah dikenali,” (hal. 263) Disebutkan pula pada 122). Bahwa peran adalah suatu sistem aturan yang berisi standar perilaku dan "Pedoman hal ini didasarkan pada peraturan masyarakat yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan.

E. Winardi juga memberikan pengertian peran kepemimpinan (2003: 63) sebagai suatu hal yang mencakup kegiatan dikarenakan bawahannya dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan mereka. Hal ini mencakup semuanya, mulai dari menugaskan tugas hingga mempekerjakan karyawan (Staffing).

Ali Hasymi (2002: “konsep peran berkaitan dengan aktivitas seseorang dalam suatu posisi tertentu” adalah definisi yang diberikan dalam (hlm. 431-432) menjelaskan perilaku yang diharapkan dari dirinya jika memegang posisi dalam sistem sosial atau organisasi.

James E. Rosenzweig dan Freemont E. Kast (terjemahan Hasymi Ali, 2002: 432), menekankan, "Peran biasanya didefinisikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan dari setiap orang dalam posisi tertentu, terlepas dari identitasnya. Secara alami, masyarakat menentukan (menertibkan) perilaku

ini. Akibatnya, peran tersebut membatasi jenis ekspresi kepribadian yang dapat dilakukan dalam situasi tertentu.

Pandangan lain Rivai Z. (2004: 148) menyatakan, “Peran diartikan sebagai tingkah laku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam suatu kedudukan tertentu”. Secara khusus, tindakan atau perilaku Kepala Dinas Sosial (Kadisos) sebagai perangkat pelaksana penegakan peraturan daerah di bidang sosial harus memenuhi tanggung jawab utamanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Aspek dinamis dari peran adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan orang untuk memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Wajar jika seseorang memainkan peran ini dengan baik, dia akan berharap apa yang terjadi sesuai dengan keinginan lingkungan. Tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang berstatus itulah yang dimaksud dengan peran. Untuk memberikan peran status. Oleh karena itu, peran dan status sangat erat kaitannya karena peran melibatkan aspek status yang dinamis, seperti menjalankan hak dan kewajiban.

Sedangkan peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa adalah apa yang dimaksud oleh Poerwodar Minta (1995). Menurut Poerwadarminta, yang dimaksud dengan tindakan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh warga masyarakat. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan:

Soekanto (2012) menegaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Menurut Soekanto (2012), perbedaan kedudukan dan peran bermanfaat bagi ilmu pengetahuan jika seseorang memenuhi tanggung jawab dan haknya sesuai dengan kedudukannya. Karena ketergantungan satu sama lain, keduanya tidak dapat dipisahkan. Selain itu, Soejono Soekanto menyebutkan aspek-aspek jabatan sebagai berikut:

1. Meliputi norma yang didasarkan pada status atau kedudukan seseorang dalam masyarakat.
2. Suatu konsep tentang bagaimana individu berpartisipasi dalam masyarakat sebagai sebuah kelompok.
3. Sebagai perilaku individu yang sangat penting bagi struktur sosial masyarakat; karakteristik peran, yaitu:
 1. Pekerjaan memasukkan pedoman budaya yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang di mata publik. Dalam pengertian ini, pekerjaan adalah sekumpulan aturan untuk aktivitas publik seseorang.
 2. Pekerjaan adalah gagasan tentang apa yang dapat dilakukan seseorang di mata publik sebagai sebuah asosiasi.
 3. Pekerjaan juga dapat dikatakan sebagai cara berperilaku yang penting bagi tatanan masyarakat.

Hal-hal penting yang terkait dengan peranan :

1. Bahwa peranan-ika struktur masyarakat ingin dipertahankan, peran harus dijalankan.

2. Peranan tersebut seharusnya dilekatkan pada individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya.
3. Ada orang-orang dalam masyarakat yang kadang-kadang tidak mampu memenuhi peran mereka seperti yang diharapkan oleh masyarakat.
4. Apabila semua individu mampu memenuhi peran mereka, dan kemampuan masyarakat untuk memberikan kesempatan yang seimbang tidak pasti.

Kutipan (Soekanto, 1987), lebih lanjut Soejono Soekanto mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut:

1. Peranan termasuk pedoman untuk tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu ide tentang apa individu dalam masyarakat dapat di capai sebagai suatu organisasi.

Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Adapun Sesuai dengan pengertian tersebut di atas, maka kepala dinas sosial berwenang menegakkan peraturan kehidupan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Regulasi tersebut antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan mengantisipasi permasalahan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berikut ini adalah aspek-aspek dari posisi:

1. Kedudukan peran akan menentukan harapan yang dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi, dan peran tersebut bersifat impersonal.

2. Peran berkaitan dengan perilaku kerja, atau perilaku yang diharapkan dari suatu pekerjaan.
3. Peran dan Pekerjaan bukanlah hal yang sama, dan orang yang melakukan pekerjaan itu mungkin juga berperan.

Suatu pekerjaan juga dapat digambarkan dalam komponen berikut:

1. Peran yang ideal (*ideal role*)

Peran ini dapat diartikan sebagai jabatan yang dapat diisi oleh orang yang menduduki jabatan tersebut. Misalnya, suatu organisasi formal tertentu yang dikenal dengan nama dinas sosial diharapkan dapat berperan nyata dalam melindungi masyarakat dengan menciptakan ketertiban dan keamanan dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Peran yang seharusnya (*expected role*)

Peran Ini adalah peran yang dimainkan seseorang atau organisasi dalam kehidupan masyarakat berdasarkan seperangkat aturan.

3. Peran yang sebenarnya dilakukan (*Actual Role*)
4. Peran Ini adalah situasi di mana seseorang atau organisasi berpijak pada lapangan aktual atau realitas sosial masyarakat.
5. Ada beberapa peran, menurut teori peran Jim Ife dan Frank Tesoriero (2016):

1. Peran Fasilitator

Peran fasilitator adalah peran membantu, kelompok dan komunitas menjadi lebih produktif dengan memperkuat, mengenali dan

menghargai upaya mereka. Jim Ife mengidentifikasi tujuh peran berbeda untuk fasilitator, yang meliputi animasi sosial, mediasi dan negosiasi, dukungan, pembentukan konsensus, fasilitator kelompok, pemanfaatan sumber daya, dan organisasi.

2. Peran Edukasi

Peran edukasi adalah sebuah peran menyusun agenda sehingga tidak hanya membantu dalam pelaksanaan proses peningkatan produktivitas, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan masukan dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman bagi individu, kelompok masyarakat dan komunitas.

3. Peran Representasional

Peran representasional adalah bertugas untuk berinteraksi dengan masyarakat untuk kepentingan individu, maupun kelompok dan masyarakat. Peran tersebut dilakukan dengan mencari narasumber, melakukan advokasi, memanfaatkan media sosial, kehumasan, berjejaring serta berbagi ilmu dan pengalaman.

4. Peran teknis

Peran teknis adalah peran untuk layanan pekerja sosial mengumpulkan dan menganalisis data, menggunakan komputer, memberikan presentasi, mengelola dan melakukan kontrol keuangan, dan melakukan penilaian kebutuhan pengembangan potensi individu, kelompok, dan masyarakat adalah contoh dari keterampilan ini.

Dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu dinamika fungsi yang melekat pada diri seseorang atau badan, yang di dalamnya terdapat wewenang, hak, dan kewajiban yang harus dijalankan, berdasarkan beberapa pendapat di atas.

2.2.2 Peranan Dinas Sosial

Tugas pokok dinas sosial dari perangkat daerah, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemerintah daerah.

Peran atau upaya-upaya yang telah dilakukan dinas sosial antara lain :

1. Melaksanakan pelayanan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah Kesejahteraan (PMKS).
2. Mengembangkan aktif bagian yang dimainkan pada masyarakat dalam pertumbuhan kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan ketahanan sosial di masyarakat.
4. Meningkatkan profesionalisme aparatur berbasis kesejahteraan sosial.

Berdasarkan tugas atau peran ini ditafsirkan ulang dengan cara yang lebih spesifik, seperti:

1. Program pemberdayaan masyarakat miskin, terpencil (KAT), dan masyarakat yang bermasalah dengan jaminan sosial (PMKS) melalui tindakan sebagai berikut:
 - a. Pembangunan perumahan Masyarakat Adat Terpencil (KAT).
 - b. Pembentukan, pengembangan keterampilan, dan dukungan untuk kelompok usaha patungan (KUBE)
 - c. Bantuan perbaikan rumah miskin atau tidak layak huni.

2. Kegiatan pendataan anak terlantar sebagai bagian dari program pembinaan anak terlantar.
3. Program pembinaan panti asuhan melalui kegiatan pendampingan tambahan pemenuhan kebutuhan pokok.
4. Melalui kegiatan-kegiatan berikut diberikan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial:
 - a. Sebuah. Memberi perintah, pembinaan, dan pengarahan kepada gelandangan dan pengemis.
 - b. Bantuan Pemerolehan keterampilan ekonomi dan usaha produktif (UEP) oleh sekolah luar biasa
5. Program pengembangan panti jompo dan panti asuhan melalui kegiatan pengadaan infrastruktur panti asuhan.

2.3 Dinas Sosial

2.3.1 Pengertian Dinas Sosial

Dinas sosial adalah lembaga yang dikenal sebagai lembaga sosial atau sosial adalah lembaga di mana pekerja struktural atau sosial secara teratur menjalankan tata kelola sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun masyarakat, dan melayani kepentingan publik lainnya yang terkait dengan masyarakat.

2.3.2 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Tugas dinas sosial adalah membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial adalah membantu bupati melaksanakan

urusan pemerintah bidang yang menjadi wewenang daerah dan tugas pembantun.

Fungsi dari dinas sosial yakni :

1. Perumusan di bidang aturan sosial
2. kebijakan dalam melaksanakan tugas dibidang sosial
3. Evaluasi kembali tugas dan laporan dibidang sosial
4. Tugas administrasi dinas dibidang sosial
5. Tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugasnya.

2.4 Evaluasi Program

2.4.1 Pengertian Evaluasi Program

Bahasa evaluasi yang berasal dari bahasa Inggris yaitu adalah *evaluation* yang diartikan ujian. Evaluasi adalah sebuah pengumpulan berkas, untuk memastikan tujuan dan sejauh mana program ini dapat dicapai. Evaluasi adalah alat untuk digunakan menganalisis dan menilai perubahan dari ilmu dan getahuan, suatu cabang dan pengetahuan, ilmu evaluasi yang didukung oleh sebagian peneliti. Evaluasi dan umumnya diperlihatkan dengan sejauh mana keefektifan menilai dari suatu kebijakan atau program yang perlu dipertanggung jawabkan kepada pihak yang berwenang, evaluasi ini dapat digunakan sebagaimana mana tujuan pencapaian dan untuk masa kedepannya dengan keinginan dan kebenaran di lapangan tersebut.

Secara umum Menurut Anderson dan Winarno (2008:166), “evaluasi merupakan suatu kegiatan dan menyangkut estimasi, dan penilaian yang adil dan mencakup suatu, implementasi dengan dampak kebijakan itu sendiri.

Yang perlu di ketahui ada beberapa dari suatu, rencana yang akan dioperasikan, sebagaimana di dalamnya suatu unit dan rancangan strategis dan rangkaian yang harus di rencanakan pada waktu tertentu Menurut pendapat Arikunto pada tahun (2004:2), dapat dilihat pada dua inti, yaitu:

1. Pemahaman umum yang dapat diartikan sebagai susunan atau rencana latihan yang akan dilakukan mulai saat ini.
2. Definisi tersebut secara eksplisit terkait dengan penilaian, dan itu menyiratkan kesatuan unit tindakan yang merupakan pelaksanaan strategi, terjadi dalam siklus yang terus-menerus dan terjadi dalam suatu asosiasi yang mencakup pertemuan.

Menurut Isaac dan Michael (1984: 6), suatu program yang telah dilaksanakan harus diakhiri dengan penilaian, hal ini dengan alasan untuk melihat apakah program tersebut telah berhasil dalam hal pemenuhan kemampuan yang belum sepenuhnya diselesaikan. Sesuai Isaac dan Michael, ada tiga fase perkembangan penilaian program, khususnya:

- a. Ekspresikan pertanyaan dan tunjukkan data yang akan diperoleh
- b. Mencari informasi yang relevan untuk diselidiki
- c. Berikan data yang dibutuhkan oleh kepala suku untuk melanjutkan, meningkatkan atau menghentikan program.

Penilaian program adalah perkembangan latihan yang diselesaikan dengan sengaja ditentukan untuk mengevaluasi/memperkirakan tingkat hasil suatu program. Seperti yang ditunjukkan oleh Arikunto (2009: 5), penilaian sistem unggulan adalah gerakan yang dilakukan untuk melihat apakah tujuan instruktif telah dipahami, penilaian program adalah pekerjaan untuk memberikan data yang akan diteruskan ke kepala suku.

Dari anggapan-anggapan yang telah dipahami oleh para ahli di atas, cenderung diduga bahwa penilaian program adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan tekad untuk melihat hasil atau keuntungan serta pengaruh dari latihan atau proyek yang telah dijalankan.

2.4.2 Tujuan Evaluasi Program

Sebagai ditunjukkan oleh Arikunto (2004: 13), penilaian memiliki dua sasaran, khususnya sasaran luas yang dikoordinasikan pada program secara keseluruhan, dan sasaran eksplisit yang ditekankan pada setiap bagian.

Sedangkan alasan penilaian program seperti dikemukakan oleh Mulyatiningsih, (2011: 114). Penilaian program dilakukan dengan target yang menyertainya:

1. Menunjukkan komitmen program untuk mencapai tujuan asosiasi, konsekuensi dari penilaian ini signifikan untuk peningkatan program serupa di tempat yang berbeda.
2. Mengejar pilihan-pilihan mengenai keberlangsungan suatu program, apakah program tersebut harus dilanjutkan, diperbaiki atau diakhiri.

Seperti yang ditunjukkan oleh penilaian yang berkualitas di atas, cenderung diasumsikan bahwa alasan penilaian program adalah tindakan untuk mengetahui keadaan suatu program apakah program tersebut dapat digunakan untuk diteruskan sebagai bahan perbaikan di tempat lain. , lanjut namun tetap dulu atau dihentikan sehingga tidak umum digunakan.

2.4.3 Manfaat Evaluasi Program

Kegiatan penilaian tidak dapat dipisahkan dari sekadar memutuskan dan strategi lebih lanjut untuk suatu program. Dari hasil penilaian program, pimpinan akan memutuskan perkembangan proyek yang sedang atau telah dijalankan.

Menurut arikunto (2012:22), ada empat strategi yang dapat ditempuh dalam melihat hasil dalam menjalankan suatu program, yaitu:

1. Menghentikan program karena terlihat bahwa program tersebut tidak memiliki keuntungan, atau tidak dapat dijalankan dengan benar
2. Mengubah program karena bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan bentuknya.
3. Melanjutkan program karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa semuanya berjalan dengan asumsi, dan telah menciptakan hasil yang berharga
4. Penyebarluasan atau penyebaran program (melaksanakan program di tempat yang berbeda atau mengulang program di tempat lain), karena program telah dijalankan dengan baik, baik jika dilakukan di tempat lain atau diulang pada waktu yang berbeda.

Dari paparan sebagian dari asumsi-asumsi yang memenuhi syarat di atas, cenderung dianggap bahwa latihan penilaian tidak dapat dipisahkan dari strategi atau program, untuk memutuskan dan strategi dalam kaitannya dengan pengelolaan program, karena ini akan sangat menentukan apakah program yang sedang dieksekusi atau telah dilakukan dapat pergi ke tempat lain, dilakukan kembali di beberapa titik lain atau dihentikan.

2.7 Indikator Kondisi Keberhasilan

Indikator keberhasilan menggabungkan dua sudut pandang, khususnya tanda pencapaian program dan tanda pencapaian klien. Petunjuk-petunjuk yang dapat digunakan untuk mensurvei kemajuan program syafaat antara lain:

1. Telah menggunakan standar praktik pekerjaan sosial dengan individu yang tidak mampu.
2. Menggunakan pendekatan, kemampuan dan strategi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi klien.

Sementara itu, tanda-tanda pencapaian klien harus terlihat dari pemahaman tentang mediasi sosial untuk individu penyandang cacat, menjadi upaya khusus untuk membangun kembali atau berpotensi menumbuhkan semangat dan kapasitas klien dalam perubahan pribadi dan penyesuaian dengan iklim sosial mereka (perubahan sosial).) untuk individu dengan ketidakmampuan. Dalam situasi khusus ini, mediasi sosial lebih menekankan kerja sosial-mental klien yang dimunculkan menjadi sasaran mediasi sosial bagi penyandang disabilitas, khususnya:

- a. Memiliki otonomi orang cacat dalam administrasi diri
- b. Kemampuan korespondensi dan hubungan yang diperluas
- c. Siap melakukan kemampuan sosial dan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga, pertemuan dan iklim daerah setempat.
- d. Penghargaan identitas yang diperluas dan keberanian

Dengan cara ini tanda dari hasil mediasi sosial terhadap penyandang cacat adalah :

1. Memperluas otonomi penyandang disabilitas dalam mengatur diri sendiri
2. Bekerja pada kapasitas untuk menyampaikan dan berhubungan dengan orang lain.
3. Kemampuan untuk menyelesaikan kemampuan sosial dan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari
4. Memperluas kepercayaan diri klien.

1.7 Teori Kemiskinan

1.7.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan seseorang atau kelompok tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, penginapan, pelatihan, dan kebutuhan kesejahteraan yang sah. Tentu saja, hal ini juga dapat dilakukan oleh otoritas publik, terlebih lagi secara definitif melalui jaminan garis kemiskinan yang tidak sepenuhnya ditentukan melalui pengaturan keuangan.

Secara etimologis, "kemelaratan" berasal dari bahasa "miskin" dan itu menyiratkan tidak ada kelimpahan dan segala kesulitan. Administrasi sosial dan pekerjaan terukur menggambarkan kemelaratan menurut sudut pandang kebutuhan

Kebutuhan dicirikan sebagai ketidakberdayaan tunggal untuk memenuhi persyaratan fundamental dasar untuk kehidupan yang adil (PBS dan Pelayanan Para Pihak, 2002). Lebih lanjut dikemukakan bahwa kemelaratan adalah suatu keadaan yang berada di bawah garis standar nilai kebutuhan terkecil, baik untuk makanan maupun bukan makanan, yang dikenal dengan garis kemelaratan atau garis kemelaratan.

Kemiskinan adalah apa yang terjadi dari kesulitan total yang terjadi tidak dibutuhkan oleh orang miskin. Penduduk secara keseluruhan digambarkan dengan rendahnya tingkat pelatihan, efisiensi kerja, gaji, kesejahteraan dan gizi serta bantuan pemerintah sehingga menunjukkan pola kelemahan. Kemelaratan disebabkan oleh terbatasnya SDM yang dimiliki dan digunakan, terutama dari tingkat pengajaran formal dan non-formal dan berkonsekuensi pada rendahnya pendidikan kasual (Supriatna, 2000: 196).

1.7.2 Pengertian Kemiskinan Menurut Para Ahli

a. Halli dan Midgley

Menurut Hall dan Midgley Gagasan tentang kebutuhan adalah keadaan kesulitan material dan sosial yang membuat orang hidup di bawah cara hidup yang adil, atau kondisi di mana orang mengalami kesulitan relatif dibandingkan dengan orang lain di mata

publik. Faturachman dan Marcelinus Molo selanjutnya pengertian kemiskinan.

b. Faturachman dan Marcelinus Molo

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau beberapa orang (rumah tangga) untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

c. Reitsma dan Kleinpenning

Pengertian kemiskinan menurut Reitsma dan Kleinpenning adalah ketidakberdayaan orang untuk mengatasi masalah mereka, baik materi maupun non materi. Suparlan

Menurut Suparlan, arti kemelaratan adalah rendahnya harapan akan kenyamanan sehari-hari karena kekurangan materi untuk berkumpul atau berkumpul jika dibandingkan dengan cara hidup menang di lingkungan terdekat.

d. Friedman

Menurut Friedman, pengertian kemiskinan adalah disparitas kesempatan untuk membentuk kekuatan sosial sebagai sumber daya, aset moneter, asosiasi sosial-politik, organisasi interpersonal, tenaga kerja dan produk, informasi dan kemampuan, dan data.

1.7.3 Kemiskinan Tersebar Dimana Saja

Jumlah..warga miskin di wilayah Bima tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Kota Tepain Air saat ini berada di urutan ketiga dengan jumlah terbanyak di NTB. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Pengukuran (BPS) wilayah Bima, angka

kemiskinan tahun 2021 akan mencapai 16.220 orang dari lebih dari 800 ribu orang. Pada tahun 2020 hanya 14.660 orang. Di NTB, Aturan Bima berada di urutan ketiga setelah Kota Mataram dan Rezim Sumbawa Barat, tingkat penduduk di Aturan Bima yang tergolong miskin juga bertambah. Tahun 2020 mencapai 8,35 persen, sedangkan tahun 2021 naik menjadi 8,88 persen. Kelas garis kemiskinan dievaluasi dari gaji pokok per kapita setiap bulan untuk mengatasi masalah mendasar, baik makanan maupun non makanan. Bila dialihkan sepenuhnya ke rupiah, kebutuhan per kapita setiap bulan di Bima pada tahun 2020 sekitar Rp. 383.161 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 399.193.

1.7.4 Jenis Jenis Kemiskinan

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah jenis kebutuhan di mana individu miskin memiliki tingkat gaji di bawah garis kebutuhan atau berapa banyak gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti makanan, pakaian dan perlindungan.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah semacam kemelaratan yang terjadi karena dampak dari strategi pembenahan masyarakat miskin yang belum sampai ke seluruh wilayah setempat. Sehingga menimbulkan ketimpangan upah atau bisa dikatakan bahwa seseorang memang hidup di atas garis kemiskinan namun masih di bawah kemampuan masyarakat sekitar.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan sosial adalah semacam kemelaratan yang disebabkan oleh variabel-variabel sosial, misalnya kelesuan, tidak ada pekerjaan untuk bekerja secara adil dan seimbang, pemborosan, dll.

d. Kemiskinan struktural

Kemiskinan yang mendasarinya adalah kemelaratan yang dialami suatu kelompok karena konstruksi sosial masyarakat setempat memungkinkan kelompok tersebut tidak ikut memanfaatkan jenis-jenis pendapatan yang memang tersedia bagi mereka.

1.7.5 Faktor Penyebab Kemiskinan

Ada beberapa alasan normal untuk kemelaratan, termasuk:

a. Tingkat pendidikan rendah

Komponen instruksi kemiskinan yang utama bisa jadi karena rendahnya tingkat pelatihan. Tingkat pelatihan yang rendah dapat membuat seseorang membutuhkan kemampuan, pemahaman, dan informasi yang memuaskan selamanya. Jika Anda melihat lebih jauh, dalam dunia kerja atau dunia bisnis, pelatihan adalah arus kas yang harus diperjuangkan jika Anda ingin sukses di kemudian hari. Jadi jangan heran, jika banyak pengangguran terjadi karena faktor-faktor penyebab kemiskinan, yaitu tingkat pendidikan yang rendah.

b. Malas Kerja

Selanjutnya, Alasan kemelaratan adalah malas bekerja. Alasan kemelaratan ini memiliki hubungan dengan alasan kemelaratan di masa

lalu, khususnya rendahnya pelatihan. Seseorang dengan tingkat pengajaran yang rendah membuat dirinya lamban bekerja karena tidak memiliki barang dan informasi yang tepat. Individu yang lesu untuk melanjutkan pekerjaan dapat mempengaruhi tingkat pengangguran yang lebih signifikan.

c. Kualitas Kesehatan Buruk

Masalah terjadinya kemiskinan merupakan di pengaruhi oleh buruknya kualitas negara. Dikarenakan akses, dan layana pada biaya pegobatan yang sangat besar dikarenakan mahal bagi masyarakat dengan ini masyrakat mendengar harga obat yang sangat mahal dengan kapasitas kemampuan masayrakat tidak murah bagi, yang tidak mampu, justru dengan mengandalkan obat ini, dapat melakukan aktivitas kembali bekerja. Hinga hal tersebut menjadi faktor utama penyebab kemiskinan tersebut.

d. Sumber Daya Alam Tidak Ada

Faktor dari alasan penyebab kemiskinan adalah hal yang wajar di setiap negara, terutama negara berkembang dan negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Bila harta kekayaan biasa tidak ada atau tidak dapat dikelola, maka hal ini dapat menjadi faktor penyebab kemelaratan.

e. Modal Terbatas

Kemudian, modal yang terbatas juga bisa menjadi penghalang bagi seseorang untuk berkreasi. Juga jika individu tersebut memiliki tingkat

pelatihan yang rendah. Mengingat, banyak alasan sekolah rendah karena faktor keuangan keluarga.

e. Harga Kebutuhan Tinggi

Mahalnya biaya kebutuhan merupakan salah satu faktor penyebab kemelaratan yang sering terjadi dan menjadi pembenaran mengapa masyarakat kurang mampu merasa kurang dan tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selangkah demi selangkah biaya bahan makanan melonjak, sejujurnya. Oleh karena itu, mereka perlu memotong biaya untuk keperluan yang berbeda dan mengalihkan ke pemanfaatan makanan.

f. Lapangan Kerja Terbatas

Faktor alasan kemelaratan berikutnya adalah karena lapangan atau tempat bisnis sangat terbatas. Waualaupun seseorang dapat membuat posisi baru, lapangan yang terbuka sangat kecil bagi orang miskin karena kemampuan dan modal yang terbatas.

g. Beban Hidup Keluarga

Faktor Alasan kebutuhan selanjutnya adalah beban kehidupan sehari-hari. Ini juga sangat besar. Ketika seseorang memiliki banyak kerabat untuk ditolong, beban hidupnya tentu saja akan bertambah juga. Dengan begitu seseorang diharapkan untuk membangun gajinya sesuai dengan jumlah orang yang dia butuhkan untuk tinggal bersama.

2.8.6 Dampak Dari kemiskinan

Ada beberapa hal masalah yang perlu diketahui, antara lain:

a. Tingkat pengangguran yang sangat tinggi

Efek utama dari kemelaratan, bisa membuat jumlah pengangguran semakin meningkat. Ini karena pengangguran terkait erat dengan pelatihan yang rendah. Tidak dapat disangkal sulit bagi orang miskin untuk mendapatkan izin masuk ke pendidikan, yang kemudian membuat mereka kehilangan kemampuan dan pengaturan untuk menemukan pekerjaan yang bagus.

b. Kriminalitas tinggi

Akibat dari kemelaratan yang sangat penting untuk diketahui adalah meluasnya maksiat. Orang-orang miskin seringkali akan berhasil bertahan, bagaimanapun caranya.

c. Tertutupnya akses pendidikan

Tertutupnya akses jalur pendidikan menjadi salah satu efek dari kebutuhan yang dapat dirasakan. Biaya pendidikan yang cukup tinggi sehingga orang miskin tidak dapat mengelola biaya pengajaran. Dengan asumsi mereka membutuhkan pendidikan, mereka tidak bisa bersaing dan tidak bisa bangkit dari keterpurukan.

d. Tinggi angka kematian

Yang terakhir, efek kemiskinan membuat tingkat semakin tinggi. Efek ini terkait dengan faktor penyebab kemelaratan, khususnya rendahnya kualitas kesejahteraan. Banyak orang yang hidup di bawah

garis kemiskinan tidak dapat memperoleh akses ke kesejahteraan yang memadai. Ini bisa menjadi alasan tingginya angka kematian. Kemudian, ketidaksehatan orang miskin adalah merupakan ketakutan, yang luarbiasa karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan.

2.8.7 Ciri-Ciri Kemiskinan

Kemiskinan memiliki beberapa kualitas, antara lain:

- a. Ketidakberdayaan untuk memenuhi kebutuhan pemanfaatan esensial (pangan, sandang dan rumah aman).
- b. Tidak adanya izin masuk ke kebutuhan dasar kehidupan lainnya (kesejahteraan, instruksi, sterilisasi, air bersih dan imigrasi).
- c. Tidak ada jaminan untuk masa depan (karena tidak ada minat dalam pelatihan dan keluarga).
- d. Ketidakberdayaan terhadap guncangan yang bersifat individual atau massal).
- e. Kualitas SDM yang buruk dan aset reguler yang terbatas.
- f. Non-kontribusi dalam latihan area lokal.
- g. Tidak adanya bisnis membuka pintu dan pekerjaan yang mendukung.
- h. Ketidakberdayaan untuk bekerja karena cacat fisik atau mental.
- i. Ketidakmampuan sosial dan tindakan merugikan (anak-anak terabaikan, perempuan penyintas perilaku agresif di rumah, janda malang, perkumpulan minim dan bercerai berai (Suharto, 2005: 132)

2.8.8 Permasalahan Kemiskinan

Neediness memiliki persoalan yang kompleks, mulai dari masalah persoalan dan strategi yang diambil untuk mengalahkannya. Kemelaratan di Kota Rato, Daerah Bima, merupakan hal sosial yang kompleks, karena meliputi rendahnya gaji, kesejahteraan dan pendidikan, penginapan dan kelemahan individu, serta kelemahan. Hal ini menyebabkan mereka yang tinggal di permukiman dengan hidup yang mengerikan, dan mengalami kesulitan untuk mencapai kantor kesehatan, sekolah dasar, dan peluang kerja. Kondisi ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Roebyantho, dkk (2011), bahwa pada umumnya kemelaratan lebih sering dikonseptualisasikan berkaitan dengan kekurangan gaji dan sumber daya (ketiadaan gaji dan sumber daya) untuk mengatasi masalah-masalah esensial seperti makanan, pakaian, penginapan, pelatihan dan kesejahteraan (tingkat aspek keuangan) dan mengatasi masalah tingkat sosial, ekologi, penguatan dan kerjasama (aspek non-moneter). Mereka juga memiliki pandangan dan pedoman sendiri terkait bantuan sosial pemerintah, sehingga otoritas publik dan pihak terkait perlu memediasi kemajuan daerah untuk menggarap bantuan pemerintah yang ramah.

Berdasarkan hasil- Konsekuensi dari beberapa kajian eksplorasi, bahwa peristiwa kemelaratan dan persoalan sosial yang dibawa oleh unsur dalam dan faktor luar. Unsur batin, yaitu ketidakberdayaan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, ketidakmampuan melakukan pekerjaan sosial dan ketidakberdayaan untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapinya.

Kemudian elemen luar, khususnya: strategi publik yang mendukung orang miskin; tidak dapat diaksesnya administrasi sosial yang penting; pilihan untuk kepemilikan tanah tidak dijamin, ada posisi terbuka terbatas, kerangka keuangan kelompok belum dibuat, ketidakseimbangan dan ketidakadilan sosial, serta efek perbaikan situasi pengusaha. Seperti yang diungkapkan oleh Suradi, dkk (2012), bahwa kemelaratan dan kebutuhan pokok merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai aturan, kemelaratan umumnya dianggap sebagai kegagalan individu/keluarga untuk memenuhi kebutuhan fundamental mereka. Sebagian besar orang miskin tidak dapat menikmati makanan yang baik, tidak mampu membeli kebutuhan pakaian, memiliki rumah yang buruk, tidak dapat menerima akses ke layanan kesehatan dan rendahnya dukungan dalam dunia pendidikan.

Orang miskin tidak berdaya dalam mengelola masalah luar dan dalam, membuat perawatan mereka jauh lebih sulit. Negara-negara yang membutuhkan dan masalah sosial yang luas memiliki pertaruhan menjadi kemiskinan sosial, tidak adanya kemauan/ menyerah/ lemah (fatalistik) dan dalam keadaan dasar akan cukup sering bertindak asosial, angkuh, cara berperilaku yang mengerikan atau berpartisipasi dalam cara berperilaku kriminal seperti perampokan, pertukaran obat terlarang, prostitusi, eksploitasi ilegal, dll.

2.9 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dengan sumber masalah yang digunakan dengan metodologi subyektif, mengumpulkan informasi dan memeriksa informasi secara (lisan dan tertulis) dan aktivitas manusia. Penelitian lapangan ini untuk memperoleh pemahaman dari luar dalam tentang masalah manusia dan sosial dengan menguraikan apa arti implikasi terhadap cara mereka berperilaku. Penelitian lapangan ini direncanakan untuk mengetahui keberadaan Pekerjaan Bantuan Sosial Dalam Penurunan Kemiskinan di wilayah bansos Bima.

3.1.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah suatu rangkaian kegiatan, cara pendekatan, upaya dalam struktur latihan eksplorasi untuk menjabarkan hubungan dengan individu yang diperiksa. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi yuridis-eksperimental yang diawali dengan penelitian standardisasi. Diikuti oleh persepsi atas ke bawah dan penyebarluas pendapat untuk memperoleh informasi tentang unsur-unsur yang terkait dan berdampak pada peraturan dan pedoman yang dipertimbangkan. Eksplorasi hukum observasional adalah sebuah metodologi dengan melihat pada realitas yang sah di mata publik. Untuk situasi ini tugas administrasi sosial dalam penanggulangan kemiskinan. Regulerisasi eksplorasi yang sah dengan

menganalisis aturan tertulis yang membatasi dalam semua sudut pandang yang terkait dengan topik bahasa yang diteliti.

Pendekatan eksplorasi ini merupakan teknik subjektif ekspresif. Strategi subyektif adalah teknik eksplorasi yang menghasilkan informasi yang menarik sebagai angka, kata-kata yang disusun atau diungkapkan secara verbal dari individu dan perilaku yang diperhatikan.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

3.2.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 1 bulan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bima

3.2.2 Tempat Penelitian

Adapun untuk pelaksanaan penelitian adalah di lokasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bima. tempat tersebut merupakan lokasi yang masalah kemiskinan, baik berupa penanggulangan maupun pemberantasan tersebut.

3.3 Sumber Data

Data adalah semua data (data) tentang semua hal yang berhubungan dengan motivasi dibalik penelitian, namun tidak semua data atau data adalah informasi, hanya sepotong data, yang berhubungan dengan penelitian. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.3.1 Data Primer

Adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui pertemuan, persepsi atau laporan sebagai arsip informal yang kemudian

ditangani oleh para analis. Informasi penting yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari artikel yang diteliti, baik secara rahasia maupun dari kantor otoritas yang mengolah informasi untuk keperluan penelitian, misalnya dengan memimpin pertemuan langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan eksplorasi yang dipimpin. Sehubungan dengan informasi penting yang disinggung para ahli di sini, khususnya informasi yang didapat langsung dari bansos wilayah Bima.

3.3.2 Data Sekunder

Informasi mengenai gambaran keseluruhan jumlah perwakilan Dinas Sosial (Dinsos), serta berkewajiban dan elemen pekerja Bansos Rezim Bima. Sedangkan informasi yang berbeda adalah jumlah penghuni di Bansos Rezim Bima dan jumlah penduduk kemiskinan/daftar nama penerima bantuan kemiskinan di dinas sosial.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Narasumber dipilih secara purposive (memiliki kaidah pertimbangan) dan tokoh kunci tersebut adalah Top Bidang Bantuan Sosial, Top Bidang Penguatan Masyarakat Miskin dan Musyawarah Lokal Malang. Saksi eksplorasi (individu aset) adalah seseorang yang memiliki data (informasi) yang luas dan menyeluruh mengenai hal yang dimaksud, meminta data tentang objek pemeriksaan. Umumnya narasumber atau saksi eksplorasi dalam penelitian dimana subjek pemeriksaannya sebagai “perkara” (satu unit tersendiri), mengingat untuk jenis yayasan atau perkumpulan atau lembaga sosial (organisasi).

Tabel narasumber dalam peninjauan Pekerjaan Bansos Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Bansos Bima adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar Penentuan Informan

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Tajuddin, SH, M.Si	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima
2.	Usman S.Sos	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bima
3.	Rijal Mukhlis, SE.	Kepala Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial
4.	Edy Syahroni, A.Ks.	Kepala Seksi Bantuan Dan Penanggulangan Bencana
5.	1. Bapak Abdul Haris 2. Ibu Dahlia	Masyarakat Penerima Program Bantuan

3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Informasi merupakan langkah yang paling penting menuju suatu penelitian, karena tujuan mendasar dalam penelitian adalah untuk mendapatkan informasi. Tanpa mengetahui prosedur pengumpulan informasi, ilmuwan tidak akan mendapatkan informasi yang memenuhi pedoman informasi yang telah ditetapkan.

Strategi pemilahan informasi yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Wawancara

Wawancara (Interview) adalah metode yang terlibat dengan mendapatkan data melalui responsif sementara tatap muka antara penanya dan individu yang dikonsultasikan untuk memperoleh data substansial yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Jadi melengkapi metode persepsi lapangan sangat membantu. Sedangkan informasi yang diperoleh dari wawancara dalam prosedur ini menggunakan metode pertemuan struktur. Diskusi ini diakhiri dengan dua kali pertemuan, yaitu penanya yang mencari klarifikasi tentang beberapa hal dan penanya yang mendapat klarifikasi tentang beberapa masalah mendesak dan penanya yang memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut. Pertemuan adalah situasi kerja relasional tatap muka, ketika seseorang, khususnya penanya, mengajukan pertanyaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan alamat yang berkaitan dengan masalah pemeriksaan kepada responden. Pertemuan ini diarahkan dengan otoritas dan kepala kantor serta beberapa jaringan kota.

3.5.2 Observasi

Penulis mengadakan langsung di lapangan untuk pengamatan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk memperoleh data.

3.5.3 Dokumentasi

Merupakan pengambilan informasi dalam bentuk dokumentasi, yang dari sudut pandang tipis metode kumpulan informasi lisan tertulis. Ilmuwan

menggunakan teknik dokumentasi untuk mendapatkan informasi tentang wilayah geologis, jumlah penduduk kota dan keadaan kantor. Teknik dokumentasi adalah strategi yang memanfaatkan bahan tradisional untuk melihat secara eksplisit pergantian peristiwa, khususnya untuk menjawab pertanyaan atau pertanyaan tentang apa, mengapa dan bagaimana.

Merupakan pengambilan data berdasarkan dokumentasi yang dalam arti sempit berarti kumpulan data verbal dalam bentuk tulisan. Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan data tentang letak geografis, jumlah masyarakat desa dan keadaan sarana. Metode dokumentasi adalah metode yang menggunakan bahan klasik untuk meneliti perkembangan yang khusus yaitu untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan tentang apa, mengapa, kenapa dan bagaimana.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini pencerahan subyektif, khususnya pemberian predikat pada faktor-faktor yang dipusatkan pada sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, predikat yang diberikan adalah melalui pemosisian berdasarkan apa yang diinginkan. Untuk memberikan predikat dalam konsentrat ini secara akurat, sebelum predikat diberikan, penanda eksplorasi diestimasi dengan recurrence yang dituangkan ke dalam tabel dan diberikan perbincangannya.

Pada rencana pengamatan data penelitian kualitatif dikutip mengenai terdiri dari tiga jalur yang selalu bersamaan analisis kualitatif, yaitu suatu Reduksi data, dan Penyajian data, penarikan dan kesimpulan.

3.6.1 Pengumpulan Data

Yang dilakukan oleh penulis dapat berupa jawaban dari pedoman yang dibuat oleh penulis, yang didapat dari aparat desa data wawancara informasi dan dari sumber penelitian terdahulu serta buku yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3.6.2 Reduksi Data

Dapat diartikan sebagai siklus penentuan, memusatkan perhatian pada peningkatan, pengabstraksian, dan perubahan informasi mentah yang muncul dari akun yang dibuat di lapangan. Dalam review ini, para ahli menggunakan prosedur penurunan informasi sehingga eksplorasi dapat difokuskan sesuai dengan keinginan para analis. Selain itu, pengurangan data juga digunakan untuk memudahkan dalam memperkenalkan informasi dan menarik diri kesimpulan

3.6.3 Penyajian Data

Pada penyajian data dilakukan secara terperinci agar dapat dengan mudah dimengerti hingga ke variable-variabel terkecil supaya dapat di gambarkan oleh penelitian.

3.6.4 Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yaitu haru mampu menjawab secara singkat dari pertanyaan yang dilakukan oleh penanya dan harus mampu menjelaskan dari hasil penelitian di lapangan yang berisi fakta berdasarkan rumusan masalah dari penelitian.

3.7 Keabsahan Data

Moleong Isra Wati (2020: 39), dalam menguji keabsahan suatu informasi ilmiah menggunakan metode triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan suatu informasi tertentu yang menggunakan beberapa pilihan yang berbeda dari informasi untuk alasan pemeriksaan atau pemeriksaan terhadap informasi, dan prosedur triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan meninjau melalui berbagai sumber. Triangulasi meliputi empat macam, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan) (3) kelompok triangulasi sumber informasi, dan (4) triangulasi hipotesis. Berikut adalah klarifikasi.

1. Triangulasi Metode

Triangulasi dilakukan dengan teknik mengkontraskan data atau informasi secara tersirat yang berbeda. Seperti diketahui, dalam pemeriksaan subjektif para ahli menggunakan pertemuan, persepsi, dan teknik belajar. Untuk mendapatkan data akurat yang dapat diandalkan dan gambaran lengkap dari data spesifik, spesialis dapat menggunakan rapat gratis dan wawancara terorganisir. Atau sebaliknya, ilmuwan menggunakan pertemuan dan persepsi atau persepsi untuk benar-benar melihat realitas. Selain itu, dokter juga bisa menggunakan berbagai saksi untuk benar-benar melihat kebenaran informasi tersebut. Melalui sudut pandang atau perspektif yang berbeda dipercaya bahwa hasil yang mendekati kenyataan akan diperoleh. Konsekuensinya, tahap triangulasi ini selesai dengan asumsi informasi atau data yang diperoleh dari subyek

penelitian atau saksi masih jauh dari jangkauan. Selanjutnya, dengan asumsi informasinya jelas, misalnya berupa teks atau isi/rekaman film, buku dan semacamnya, triangulasi tidak diperlukan. Meskipun demikian, triangulasi berbagai sudut masih terus dilakukan.

2. Antara triangulasi analisis

Triangulasi antar analisis dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu orang dalam pemilihan dan pemeriksaan informasi. Strategi ini dianggap dapat meningkatkan pengumpulan informasi sehubungan dengan data yang diambil dari subjek penelitian. Bagaimanapun, harus diperhatikan bahwa individu yang diundang untuk mengungkap informasi harus memiliki wawasan penelitian dan dibebaskan dari situasi yang tidak dapat didamaikan sehingga ini tidak terlalu merugikan spesialis dan mengarah pada kecenderungan baru dari triangulasi.

3. Triangulasi sumber informasi

Triangulasi sumber informasi menyelidiki realitas data tertentu melalui berbagai teknik dan sumber pengamanan informasi. Misalnya, selain pertemuan dan persepsi, spesialis dapat menggunakan persepsi anggota, laporan tertulis, kronik, arsip yang dapat diverifikasi, catatan resmi, catatan atau karya individu dan gambar atau foto. Tentu saja, masing-masing strategi ini akan menghasilkan bukti atau informasi yang berbeda, yang pada gilirannya akan memberikan pengetahuan yang berbeda sehubungan dengan kekhasan yang diteliti. Perspektif yang berbeda ini akan melahirkan keluasan informasi untuk mendapatkan kebenaran yang kokoh.

4. Triangulasi Hipotesis

Hasil pemeriksaan subyektif adalah sebagai perincian data atau proklamasi proposisi. Data ini kemudian dikontraskan dengan sudut pandang hipotetis yang signifikan dengan menghindari kecenderungan individu para ilmuwan atau penemuan atau tujuan selanjutnya. Demikian pula triangulasi hipotetik dapat membangun kedalaman pemahaman selama analisis dapat menyelidiki informasi hipotetik dari atas ke bawah atas akibat lanjutan dari pemeriksaan informasi yang telah didapat. Asumsikan bahwa tahap ini adalah yang paling sulit karena para ahli diharapkan memiliki penilaian ahli sambil membandingkan penemuan mereka dan sudut pandang tertentu, terutama dengan asumsi korelasi menunjukkan hasil yang sama sekali berbeda.

